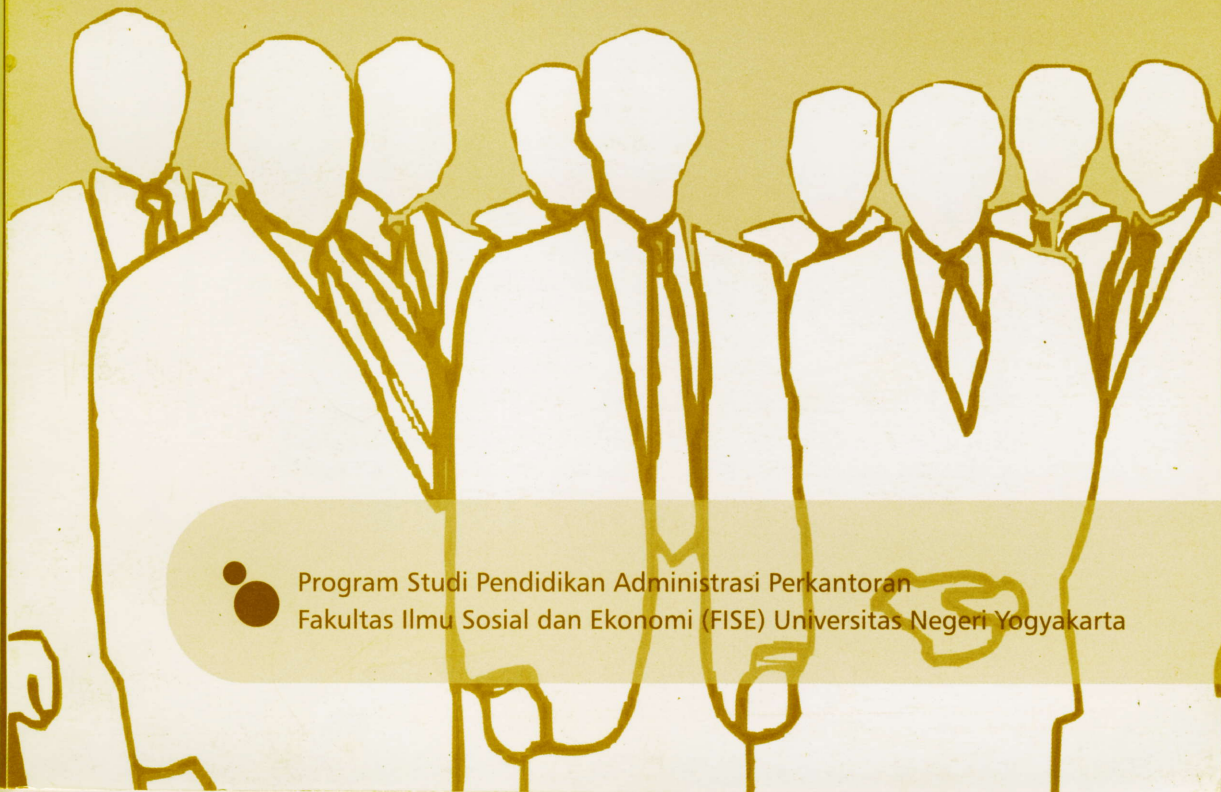


Vol. VII No. 3. September 2007 ISSN : 1412-1131

efisiensi

Kajian Ilmu Administrasi



Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
1. Pembangunan Pertanian yang Berpihak Pada Petani-----	155 - 165
<i>Oleh : Dwi Harsono</i>	
2. Perspektif Proses Internal Bisnis dalam <i>Balanced Scorecard</i> -----	166 - 171
<i>Oleh : I Gusti Ayu Ketut RH</i>	
3. Peran BUMN dalam Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah -----	172 - 182
<i>Oleh : Purwanto</i>	
4. Kewirausahaan -----	183 - 192
<i>Oleh : Sochih</i>	
5. Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Oleh Mahasiswa -----	193 - 202
<i>Oleh : Wasiti</i>	
6. Pajak Pendidikan Sebagai Alternatif Pembiayaan Pendidikan Studi Komparasi Indonesia, Malaysia dan Singapura ---	203 - 212
<i>Oleh : Indarto Waluyo</i>	

Halaman ini sengaja dikosongkan

PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG BERPIHAK PADA PETANI

Oleh
Dwi Harsono
FISE UNY

Abstrak

Indonesia adalah negara agraris tapi sektor pertanian justru menjadikan para petani sebagai buruh di lahan sendiri. Saat ini petani menjadi pekerjaan yang dipandang sebelah mata dan profesi kelas dua di masyarakat Indonesia. Kondisi berakibat pada semakin ditinggalkannya sektor pertanian oleh angkatan kerja karena memiliki masa depan kurang menguntungkan.

Masalah pertanian di Indonesia disebabkan oleh kebijakan pertanian yang lebih memfokuskan pada peningkatan produksi pertanian dan kurang memperhatikan kualitas hidup para petani. Keberpihakan pada petani sangat kurang dan nilai tambah pertanian justru tidak dinikmati para petani. Alih-alih meningkatkan produksi yang terjadi justru semakin terpuruknya sektor pertanian maupun petani.

Nilai tambah pertanian harus dinikmati oleh petani sehingga kehidupannya menjadi semakin baik dan proses produksi tetap berlanjut. Petani semakin terberdayakan karena aktivitasnya bukan lagi bersifat subsisten tapi menjadi lebih maju. Kebijakan ini tidak akan berhasil apabila tidak ada *political will* dari pemerintah untuk memperbaiki kehidupan petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini mencakup lintas wilayah, sektor, dan pelaku.

Kata Kunci : Pembangunan, pertanian, petani

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara agraris yang berbasis pada sektor pertanian. Ironi yang terjadi adalah pertanian tidak bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Swasembada beras yang tercapai

pada tahun 1984 ternyata tidak bisa dipertahankan dan hanya dua tahun kemudian Indonesia terus-menerus membuka kran impor beras (Iskandar, 2006). Menjadi importir beras merupakan kecelakaan besar ketika swasembada

kemiskinan. Ketika telah menjadi miskin, petani semakin terpuruk karena kemiskinan menjadikan petani rentan, tidak berdaya dan *voiceless* (SMERU, 2002). Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan petani untuk memperoleh nilai tambah atas produk yang dihasilkannya. Nilai tambah dari pertanian diambil oleh pengusaha dan dunia industri.

Nilai tambah pertanian harus dinikmati oleh petani. Dengan nilai tambah tersebut, petani dapat membiayai hidupnya di samping proses produksi pertanian yang menjadi mata pencahariannya. Petani semakin terberdayakan karena aktivitasnya bukan lagi bersifat subsisten tapi menjadi lebih maju. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan pertanian khususnya beras adalah memberikan nilai tambah produk pertanian khususnya padi kepada petani.

Untuk melaksanakan kebijakan yang memberikan nilai tambah produk pertanian kepada petani adalah tidak mudah. kejadian yang paling merugikan petani adalah ketika peluang untuk memperoleh nilai tambah tersebut diinterupsi oleh pemerintah melalui impor beras. Pemerintah harus betul-betul mempertimbangan keputusan untuk mengimpor beras. Kontraksi pasar terhadap kenaikan harga akibat kelangkaan dapat diukur sehingga tidak terburu-buru membuat keputusan. Memang terdapat indikasi

bahwa keputusan untuk impor beras adalah tekanan dari pihak asing (donatur bantuan). Namun seiring lunas utang ke beberapa donatur, Indonesia harus berani mengambil sikap dan mandiri dalam membuat kebijakan.

HPP dalam bentuk gabah sebagai patokan harus diubah dalam bentuk beras. Ketetapan HPP setiap daerah juga bisa berbeda. Dalam hal ini Bulog harus membeli langsung dari petani atau koperasi petani. Yang sering terjadi, Bulog membeli dari pengepul (tengkulak). Pada saat panen raya, seharusnya Bulog menarik persediaan pasar yang melimpah sesuai HPP. Namun yang terjadi, Bulog cenderung bermain sebagai pengusaha dan menekan harga di tingkat petani.

Bulog harus mengambil peran penting dalam memantau dan mengawasi tata niaga beras. Selama ini posisi Bulog ambigu yakni sebagai regulator dan pemain. Sebagai regulator, Bulog seharusnya tidak diperkenankan menjadi pemain. Dalam sepakbola akan sangat sulit mengalahkan tim yang bermain tapi merangkap sebagai wasit.

Kebijakan ini tidak akan berhasil apabila tidak ada *political will* dari pemerintah untuk memperbaiki kehidupan petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini mencakup lintas

wilayah, sektor, dan pelaku. Perbedaan kepentingan antar faktor pasti terjadi dan hal itu sangat alamiah. Ketika setiap faktor tidak bisa duduk bersama maka realisasi kebijakan ini akan semakin sulit terwujud.

Daftar Pustaka

- _____, 2002, *Buku Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*, SMERU research institute, www.smeru.or.id,
- Amir Sodikin, 2006, *Perlawanan Bisu Kaum Tani Tertindas*, Fokus Kompas, 25 Nov 2006
- Michael Lipton, 1977, *Why Poor People Stay Poor*, Harvard University Press
- Erizal Jamal dkk., 2006, *Analisis Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Gabah*, Balitbang, DEPTAN
- HS. Dillon, 1999, *Politik Pertanian*, PSDAL-LP3ES, <http://psdal.lp3es.or.id/dp35ar2.html>, update 23 Nov 2006
- Mukhamad Kurniawan, 2006, *Petani, Kuli di Lahan Sendiri*, Fokus Kompas, 25 Nov 2006
- Naomi Siagian, 2006, *Penanganan Masalah Pertanian Masih Bersifat "Ad Hoc"*, Sinar Harapan, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2004/1229/ind1.html>, 23 Nov 2006
- Noer Soetrisno, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi

Pertanian Indonesia (PERHEPI), dalam Arin Widiyanti, 2005, *Hanya 2 Program Revitalisasi Sektor Pertanian Yang Berjalan*, <http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/01/time/221741/iidnews/283360/idkanal/4>, update 26 Nov 2006

- Pepih Nugraha, 2006, *Impor Beras Jalan Terus*, Fokus Kompas, 25 Nov 2006
- Soemitro Padmowijoto, 2006, *Pertanian Berkelanjutan Seharusnya Hemat*, Kompas.com, update 23 Nov 2006
- Sri Hartati Samhadi, 2006, *Kambing Hitam Kemiskinan*, Fokus Kompas, 25 Nov 2006
- Yusep Iskandar, *Refleksi 59 Tahun Kemerdekaan Petani*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/19/1105.htm>, update 23 Nov 2006

Biodata

Dwi Harsono, lahir di Purwokerto, 15 Januari 1974. Lulus sarjana jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1998. Saat ini mengajar pada program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta